
Penguatan Literasi Pemerintahan Desa dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas di Wamena, Papua Pegunungan

Margaretha Rumbekwan¹, Nini Adelina Tanamal²

IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)¹

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia²



Email Korespondensi: retha.rumbekwan@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 15-02-2026

Disetujui 25-02-2026

Diterbitkan 27-02-2026

Katakunci:

*literasi pemerintahan desa;
transparansi;
akuntabilitas;
partisipasi masyarakat;
Wamena Papua
Pegunungan*

ABSTRAK

Penguatan literasi pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa, khususnya di wilayah pegunungan dengan keterbatasan akses informasi seperti Wamena, Papua Pegunungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai struktur pemerintahan desa, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta hak masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui tahapan identifikasi masalah, pemetaan kebutuhan, edukasi interaktif, diskusi partisipatif, simulasi musyawarah desa, serta evaluasi reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatnya keberanian warga dalam menyampaikan aspirasi pada forum musyawarah desa. Pendekatan dialogis dan pembelajaran berbasis praktik terbukti efektif dalam membangun kepercayaan sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Model pengabdian ini berpotensi direplikasi di wilayah pegunungan lainnya dengan penyesuaian terhadap karakteristik sosial dan budaya lokal guna mendukung penguatan demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rumbekwan, M. ., & Tanamal, N. A. . (2026). Penguatan Literasi Pemerintahan Desa dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas di Wamena, Papua Pegunungan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 412-418. <https://doi.org/10.63822/5ajpym42>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Sejak diberlakukannya desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Regulasi tersebut membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan warga desa dalam memahami tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menuntut keterbukaan informasi publik, sedangkan akuntabilitas mengharuskan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sosial (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks desa, kedua prinsip tersebut menjadi sangat penting karena pengelolaan dana desa melibatkan sumber daya publik dalam jumlah signifikan.

Pemerintah melalui kebijakan dana desa telah mendorong percepatan pembangunan berbasis komunitas. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan sosial di tingkat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Namun, besarnya alokasi dana juga meningkatkan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan literasi pemerintahan yang memadai di tingkat masyarakat.

Literasi pemerintahan desa merujuk pada kemampuan masyarakat dalam memahami struktur organisasi desa, mekanisme perencanaan pembangunan, proses penganggaran, serta sistem pengawasan kebijakan publik. Tingkat literasi yang rendah seringkali menyebabkan masyarakat tidak terlibat aktif dalam musyawarah desa dan tidak memahami hak pengawasan terhadap penggunaan anggaran (Dwipayana, 2020). Akibatnya, partisipasi publik cenderung bersifat pasif dan seremonial.

Dalam kerangka demokrasi partisipatif, masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui forum musyawarah desa. Partisipasi tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, penguatan literasi pemerintahan desa menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi substantif di tingkat lokal.

Kondisi ini menjadi semakin relevan di wilayah pegunungan seperti Wamena, Papua Pegunungan. Karakteristik geografis yang menantang serta keterbatasan akses informasi berpengaruh terhadap penyebaran pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan desa. Di banyak wilayah Papua Pegunungan, pendekatan komunikasi tatap muka dan berbasis komunitas masih menjadi metode paling efektif dalam proses edukasi publik.

Selain faktor geografis, aspek sosial-budaya juga memengaruhi pola partisipasi masyarakat. Struktur kepemimpinan adat dan hubungan komunal yang kuat memerlukan pendekatan edukasi yang kontekstual dan dialogis. Tanpa pendekatan yang partisipatif, program penguatan kapasitas seringkali tidak berkelanjutan karena tidak selaras dengan nilai lokal.

Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan literasi pemerintahan dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan desa (Sutoro, 2019). Kontrol sosial yang efektif tidak hanya mencegah penyalahgunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, literasi pemerintahan desa memiliki implikasi

langsung terhadap kesejahteraan warga.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga erat kaitannya dengan kewajiban pemerintah desa untuk menyediakan informasi publik secara terbuka. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Implementasi regulasi tersebut di tingkat desa memerlukan pemahaman bersama antara aparaturnya dan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Keterbatasan kapasitas administratif aparaturnya desa serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan keuangan seringkali menjadi hambatan utama (BPKP, 2022). Oleh sebab itu, pendekatan edukatif berbasis komunitas menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan tersebut melalui transfer pengetahuan dan pendampingan partisipatif. Model pendidikan pemerintahan desa yang dialogis memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antara fasilitator dan warga. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah karena mendorong keterlibatan aktif peserta.

Kegiatan penguatan literasi pemerintahan desa di Wamena dirancang untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai struktur pemerintahan desa, siklus perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme pengawasan sosial. Melalui diskusi kelompok dan simulasi musyawarah desa, peserta didorong untuk memahami peran strategis mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan partisipatif juga bertujuan membangun kesadaran kritis masyarakat bahwa pengawasan kebijakan bukanlah bentuk oposisi terhadap pemerintah desa, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Kesadaran ini penting untuk menciptakan hubungan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan literasi pemerintahan desa di Wamena, Papua Pegunungan, merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi demokrasi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat sistem sosial desa dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada upaya meningkatkan literasi pemerintahan desa guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kebijakan dan anggaran desa di Wamena. Diharapkan, intervensi ini dapat menjadi model pengabdian yang replikatif bagi wilayah pegunungan lainnya di Indonesia.

Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan pengabdian dilakukan, metodologi (jika ada) dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan, Latar belakang tidak menjelaskan terkait teori, dan diperkuat dengan kegiatan sejenis untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan. Dalam latar belakang, jelaskan juga kontribusi dari kegiatan yang dilakukan. Sumber keterangan ditunjuk dengan menuliskan di dalam kurung: nama akhir penulis dan tahun penerbitan. Disajikan secara sistematis sehingga didapatkan gambaran tentang dasar pembuatan naskah ini dan hasil yang diharapkan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Wamena, Papua Pegunungan dengan

menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Metode ini dipilih untuk menyesuaikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang lebih efektif melalui dialog langsung dan interaksi tatap muka.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara sistematis dan berjenjang guna memastikan tercapainya tujuan penguatan literasi pemerintahan desa di Wamena, Papua Pegunungan. Proses dimulai dari identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan edukasi, diskusi partisipatif, serta simulasi musyawarah desa sebagai bentuk pembelajaran kontekstual. Tahap akhir dilakukan melalui evaluasi dan refleksi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta serta efektivitas metode yang digunakan. Secara ringkas, alur pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. alur pelaksanaan kegiatan pengabdian

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui enam tahapan yang saling berkaitan. Tahap identifikasi masalah bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi literasi pemerintahan desa di masyarakat. Selanjutnya, pemetaan kebutuhan dilakukan guna menyesuaikan materi edukasi dengan konteks sosial dan pemahaman warga. Tahap edukasi pemerintahan desa difokuskan pada penyampaian materi terkait struktur organisasi desa, siklus perencanaan dan penganggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diskusi partisipatif dan simulasi musyawarah desa dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta serta memberikan pengalaman praktis mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Tahap akhir berupa evaluasi dan refleksi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sekaligus menilai efektivitas pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Wamena, Papua Pegunungan menunjukkan

respons yang sangat positif dari masyarakat. Kegiatan edukasi dilakukan secara langsung di lingkungan komunitas dengan pendekatan dialogis dan partisipatif, sehingga peserta merasa nyaman untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka terkait pemerintahan desa. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial masyarakat setempat.

Pada tahap edukasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai struktur pemerintahan desa, tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkatnya, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran desa. Berdasarkan observasi selama kegiatan, sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara utuh alur penyusunan program desa maupun proses pelaporan anggaran. Setelah sesi edukasi berlangsung, peserta mulai mampu menjelaskan kembali peran pemerintah desa serta pentingnya keterbukaan informasi anggaran sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 2. Interaksi Personal dan Penguatan Kepercayaan Komunitas

Interaksi personal yang terbangun selama kegiatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, kedekatan antara fasilitator dan warga mencerminkan terbangunnya kepercayaan sosial (social trust). Hubungan interpersonal yang hangat mempermudah proses transfer pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman maupun permasalahan terkait tata kelola desa. Kepercayaan ini menjadi fondasi dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan desa.

Proses diskusi partisipatif menjadi inti dari kegiatan pengabdian ini. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, fasilitator memposisikan diri secara dialogis di tengah peserta, menciptakan ruang diskusi yang egaliter. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, serta berbagi pengalaman terkait musyawarah desa dan pengelolaan dana desa. Model pembelajaran berbasis komunitas (community-based learning) ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis masyarakat.



Gambar 3. Proses diskusi partisipatif

Simulasi musyawarah desa yang dilakukan selama kegiatan memperkuat pemahaman warga terhadap mekanisme penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan. Peserta berlatih menyusun prioritas program serta memahami pentingnya dokumentasi dan pelaporan hasil musyawarah. Pendekatan pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*) membantu peserta memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas secara lebih konkret dan aplikatif.

Dari hasil evaluasi reflektif melalui diskusi dan pertanyaan lisan, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap struktur pemerintahan desa serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Kesadaran bahwa transparansi anggaran merupakan hak warga sekaligus kewajiban pemerintah desa menjadi salah satu capaian penting kegiatan ini. Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga memperkuat aspek sosial berupa meningkatnya keberanian masyarakat untuk terlibat dalam forum musyawarah desa.

Dalam konteks wilayah pegunungan seperti Wamena, pendekatan tatap muka dan dialog langsung sangat relevan mengingat keterbatasan akses informasi formal. Metode ini mampu menjembatani kesenjangan literasi pemerintahan desa yang selama ini menjadi tantangan di daerah terpencil. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi pemerintahan desa melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Model ini berpotensi direplikasi pada desa-desa lain di wilayah Papua Pegunungan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Wamena, Papua Pegunungan menunjukkan bahwa penguatan literasi pemerintahan desa melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Edukasi mengenai struktur pemerintahan desa, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu mendorong warga untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemerintahan desa. Pendekatan dialogis, diskusi partisipatif, dan simulasi musyawarah desa terbukti menciptakan ruang belajar yang inklusif dan kontekstual. Metode ini tidak hanya meningkatkan aspek kognitif peserta, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan sosial terhadap kebijakan desa. Terbangunnya kepercayaan sosial antara fasilitator dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan. Dalam konteks wilayah pegunungan dengan keterbatasan akses informasi, model edukasi berbasis tatap muka dan interaksi langsung sangat relevan dan adaptif. Program ini berkontribusi dalam membangun fondasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ke depan, model penguatan literasi pemerintahan desa ini berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik sosial dan budaya setempat guna mendukung penguatan demokrasi lokal yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat dan tokoh adat di Wamena, Papua Pegunungan yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Partisipasi dan keterbukaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program penguatan literasi pemerintahan desa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perangkat desa dan seluruh pihak yang telah membantu proses koordinasi serta memfasilitasi kegiatan di lapangan. Penghargaan diberikan kepada tim pelaksana pengabdian yang telah bekerja secara kolaboratif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Papua Pegunungan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2022). *Pengawasan pengelolaan dana desa*.
Dwipayana, A. A. G. N. (2020). *Membangun desa dan pemberdayaan masyarakat*. IRE Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan dana desa dan evaluasi pengelolaannya*.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
Sutoro, E. (2019). *Desentralisasi dan demokrasi lokal*. IRE Press.